

Bupati Sampaikan Aliran Anggaran Kas Daerah

Viodeogo
Borneo Tribune, Putussibau

Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir menjelaskan perhitungan dan aliran keuangan kas daerah tahun ang-

garan 2010. Penjelasan itu merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2010 kepada DPRD Kapuas Hulu, Senin (22/8) di Aula DPRD Kapuas Hulu.

Ia menyampaikan sejumlah tanggapan. Salah satunya dari Fraksi PDIP tentang sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp. 78.748.780.196,61 terdiri dari kas daerah sebesar Rp. 75.600.704.790,11. Sisa anggaran itu, Nasir katakan merupakan kas yang masih utuh dan riil di kas daerah pada posisi tanggal 31 Desember 2010.

Namun telah digunakan sebagai anggaran kegiatan belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2011 sebesar Rp 60.563.437.500. Serta kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 3.148.075.406,51 merupakan kas yang masih berada di bendahara pengeluaran dan belum disetor ke kas daerah pada posisi 31 Desember.

Angka SILPA yang tersaji dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kapuas Hulu tahun 2010 adalah sebesar Rp.78.748.780.196,61 merupakan pelampauan pendapatan sebesar Rp. 32.981.295.964,46.

Penghematan belanja sebesar Rp 45.038.853.943,00 selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 728.633.140, dan SILPA negatif anggaran sebesar Rp. 2.832,84. Pelampauan pendapatan terdiri dari PAD sebesar Rp. 7.645.504.079,24. Pendapatan transfer sebesar Rp 25.065.588.500,22. Lainnya pendapatan yang sah sebesar Rp. 270.203.367 dan dikurangi minus penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 21.343.980.

Sementara penghematan belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 15.310.154.376, belanja modal sebesar Rp. 27.735.138.425, belanja tak terduga sebesar Rp. 1.917.031.041, dan penghematan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 749.997.120. Dikurangi dengan SILPA negatif anggaran sebesar Rp 2.832,84.

"Temuan BPK RI tentang bantuan sosial senilai Rp 2.361.400.00 yang belum dilengkapi bukti penggunaan terdiri dari 126 penerima bantuan sosial. Sampai saat ini masih dalam tahap inventarisir dan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK RI untuk memerintahkan para penerima hibah dan bansos agar menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut," terang Nasir.

Selisih kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 2.158.579,26 antara kas bendahara pengeluaran di dalam neraca dengan yang disampaikan dalam pidato penyampaian bupati adalah merupakan jasa giro rekening kas bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 2.259.597,26 yang di neraca pada sisi aset lancar dicatat pada pos bendahara pengeluaran tapi di sisi kewajiban dan ekuitas dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

Pendapatan jasa giro-bukan merupakan komponen SILPA dari penghematan belanja. Jadi tidak mempengaruhi posisi arus kas dan laporan realisasi anggaran. Dikurangi dengan kas di bendahara pengeluaran Disdik Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 101.000 sehingga di neraca tidak dicatat sebagai kas di bendahara pengeluaran. Namun akan mempengaruhi laporan arus kas dan laporan realisasi anggaran karena merupakan penghematan belanja.

Sisa lebih perhitungan anggaran 2010 yang terdiri dari kas di kas daerah sebesar Rp. 75.600.704.790,11 merupakan rekening giro kas umum daerah yang ditempatkan di PT. Bank Kalbar dan BRI Cabang Putussibau.

Untuk tahun anggaran 2011, rekening kas umum daerah hanya ditempatkan pada PT. Bank kalbar Cabang Putussibau dan rekening kas umum daerah pada BRI telah ditutup sesuai Surat Sekda Kapuas hulu No. 900/1227/APB-A-2010 tentang penutupan kas umum daerah tanggal 26 Oktober 2010.

Atas penempatan tersebut, pemerintah daerah memperoleh jasa giro yang diperhitungkan setiap bulan berdasarkan besaran dana yang ada di rekening kas umum daerah. Penempatan rekening kas umum daerah pada bank yang ditunjuk adalah selama bank tersebut mampu dan ditunjuk untuk itu.

Pendapatan jasa giro rekening kas daerah untuk tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 6.891.703.891,28 dan sisa kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp. 3.148.075.406,51 sesuai dengan SK Bupati tentang penunjukkan rekening kas umum daerah, harus ditempatkan pada PT. Bank Kalbar selaku bank yang ditunjuk oleh Pemkab. □